

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996)
- Ilham Sanjaya (et. al.), 2021, *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia (2022). *Laporan Tahunan 2022 mengenai Pengawasan Hakim*. Jakarta: KY RI.
- Lubis, A. (2019). *Hakim dan Proses Peradilan: Mengungkap Peran Penting Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Lee, S. K. (2015). *Advocacy for Social Change: A Framework for Advocacy*.
- Mulyadi, H. (2020). *Hakim Pengadilan Negeri dan Peranannya dalam Proses Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023). *Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVIII/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Oktavia, S. & Rahman, A. (2024). "Penguatan Kapasitas Penghubung Komisi Yudisial". Bandung.
- Prasetya, D. (2023). "Evaluasi Fungsi Advokasi olehisial di Daerah". Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prasetyo, M. (2022). *Menjadi Hakim yang Berintegritas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Salim, B. (2021). *Peranan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal Hukum Nasional.
- Sandler, L. (2018). *The Advocacy Handbook: A Guide to Advancing Social Change*.
- Wijaya, R. (2024). "Kriminalisasi Hakim: Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Advokasi oleh KY". PT. Alumni. Bandung.

B. Perundang-Undangan

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, (online), (<https://www.wikidpr.org/>), diakses, Selasa, 03 Juli 2018), 2018.
- KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Pasal 1 butir 8, KUHP dan KUHP, *op.cit.*
- Laporan LBH Padang, 2024.
- Mahkamah Agung dan Komi Yudisial, *op.cit.*

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Hukum Pengadilan, yang mencakup tentang prosedur pengadilan dan hak-hak yang harus dilindungi dalam setiap perkara. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Hukum Pengadilan, yang mencakup tentang prosedur pengadilan dan hak-hak yang harus dilindungi dalam setiap perkara. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta, 2009)*, Pasal 1, halaman 2-3.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 22.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1), Pasal 24B UUD 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1), Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 13 UU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur hal ini dalam Pasal 13 ayat (3) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur hal ini dalam Pasal 14 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Komisi Yudisial

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tentang Menjaga Kehormatan, Martabat, Dan Perilaku Hakim.

UUD 1945 Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 tentang Tugas Dan Fungsi Advokasi

C. Jurnal

Dewi, S. (2020). *Peran Hakim dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia.

Hidayat, S., & Alamsyah, S. (2022). *Peran Advokasi dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan.

Rizki, H. (2023). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum & Keadilan. Smith,

B. R. (2017). *The Role of Advocacy in Social Policy: How Advocacy Can Shape Public Policy*. Journal of Policy Analysis and Management.

Wahyuni, A. (2022). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi Negara*. Jurnal Konstitusi, 29(2).

Yuliani, F. (2023). *Keputusan Kasasi oleh Mahkamah Agung: Fungsi dan Dampaknya*. Jurnal Peradilan Indonesia.

D. Website

Harian Kompas (2023). "Kasus Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Membela Masyarakat Adat," Kompas, 15 Mei 2023.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/objectives/about_ky

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/strategic_goals/about_ky

